

NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015

NAWACITA: SUPERIOR STRATEGY OF JOKOWI IN OCTOBER 2014 - 20 OCTOBER 2015

Mochdar Soleman
Universitas Nasional
mochdars@gmail.com

Mohammad Noer
Universitas Nasional
mochnoer@yahoo.com

Abstract

The idea of Bung Karno about Trisakti is enlarged by Jokowi as the superior strategy; sovereign in 12 programs of political field, self-reliant in 16 programs of economics and personality in 3 programs of culture, by taking into account the contemporary context, hence, it is prioritized 9 (nine) main programs or Nawacita --- as the instruments of operational strategies to become a bigger Indonesia. The content ideas of Nawacita is the economics equity for infrastructure developments as for development dialectics. It is equal to political developments since Old Era, New Era, and Reformation Era. By using qualitative method, political development strategies approaches, and the theory of National interest, hence, it is clearly seen that the political sovereignty created political equity in solving the labors issue and businessman --- to assure the protection of labors and business for the businessman to give their capital investments in domestic due to create liberal economics system and the ideological paradox. Consequently, the economic independence is needed: infrastructure developments as the connector of each island in some areas as the process of central development equity both physical and mental development. As for cultural personality: to bring back the basic philosophy of Pancasila as the guide of the nation's development path and character.

Keywords: Political developments, Trisakti, & Nawacita

Abstrak

Gagasan Trisakti Bung Karno, diperluas Jokowi sebagai strategi khusus, yakni berdaulat dalam bidang politik 12 program, berdikari dalam ekonomi 16 program dan berkepribadian dalam budaya 3 program, dengan mempertimbangkan konteks kekinian, maka, diprioritaskan 9 (sembilan) program utama atau Nawacita --- sebagai instrumen langkah-langkah taktis operasional jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih besar. Isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan. Hal tersebut selaras dengan pembangunan politik semenjak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Lewat metode kualitatif dan pendekatan strategi pembangunan politik, serta teori tentang kepentingan nasional, maka, tampak dengan jelas betapa kedaulatan politik melahirkan politik keseimbangan dalam mengatasi masalah buruh dan pengusaha --- untuk memberikan kepastian perlindungan buruh dan kepastian usaha bagi pengusaha menanamkan investasi modalnya di dalam negeri sehingga menimbulkan sistem ekonomi lebih liberal dan terjadi paradoks ideologisasi. Untuk itu, maka, diperlukan kemandirian Ekonomi: pembangunan infrastruktur sebagai penghubung antar pulau-pulau di daerah sebagai proses pemerataan pembangunan pusat dan daerah yang Indonesiasentris baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, sedang pada Kepribadian Budaya: Mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Kata kunci: Pembangunan Politik, Trisakti, & Nawacita

Pendahuluan

Pada saat menjabat sebagai Wali Kota Solo Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi, mengaku sangat suka dengan cara berpikir Bung Karno (www.merdeka.com). Terutama prinsip "Trisakti"

yang selalu menjadi dasar dan landasan Bung Karno dalam memimpin negara. Hal ini dikemukakannya dalam acara Orasi Kebudayaan dan Pentas Seni Rakyat untuk memperingati Bulan Bung

Karno di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta. Dengan demikian dapat dikatakan, betapa pentingnya bagi Jokowi untuk menggali dan mengangkat kembali gagasan Bung Karno dalam membangun bangsa dan negara ini.

HD. Haryo Sasongko (2005:iv) mengemukakan bahwa “Trisakti Bung Karno terdiri dari tiga pokok prinsip perjuangan untuk membangun bangsa dan negaranya agar tetap bebas dari penjajahan dan penindasan bangsa mana pun, untuk mencapai sosialisme Indonesia tanpa mengorbit pada blok mana pun --- ketika itu, dunia “terbelah” dalam dua blok, yakni sosialis (Timur) dan kapitalis (Barat). Tiga pokok prinsip perjuangan tersebut dikenal dengan sebutan Trisakti; *Pertama*, berdaulat di bidang politik. *Kedua*, berdikari (mandiri) di bidang ekonomi, dan; *Ketiga*, berkepribadian di bidang kebudayaan”.

Pandangan tersebut menegaskan upaya yang dilakukan Bung Karno dalam memperkokoh dan memperteguh kemandirian bangsa Indonesia dengan pijakan sendiri, tanpa tergantung pada kubu manapun. Indonesia harus mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri dalam membangun suatu cita-cita kemerdekaan; yakni sosialisme Indonesia.

Saat dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jokowi menegaskan (<http://nasional.kompas.com>); “Saya selalu ingat trisaktinya Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya,” ... bahkan lanjutnya, selalu mengingat perjuangan Bung Karno dalam membangun Indonesia saat awal-awal kemerdekaan. Bung Karno membangun Monas sebagai *line up* Jakarta agar tidak kalah dengan menara Eiffel di Paris. Ini adalah cara Bung Karno dalam membangun Indonesia”. Pembangunan politik yang disebutkan CH Dodd, (1986:14) sebagai menghasilkan masalah-masalah pembangunan negara (*state-building*), pembangunan bangsa (*nation building*), dan partisipasi masyarakat yang sedang berkembang untuk berusaha menciptakan sistem politik yang maju.

Dengan kata lain, Jokowi memperkenalkan kembali ajaran sang proklamator Indonesia, Ir. Soekarno, pada kuliah umum di Universitas Negeri Manado, Sabtu (10/5/2014) siang, saat

menjadi narasumber dalam kuliah umum tersebut dengan menjabarkan gagasan Trisakti kedalam tiga pilar bangsa, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (<http://nasional.kompas.com>),.

Selaras dengan yang tersebut di atas, Megawati Soekarnoputri pada “Pidato Kebangsaan memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2011” (Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani, 2012: 52-59): “Di tengah-tengah krisis ideologi yang melanda bangsa ini dan di tengah-tengah kegamangan kita melihat masa depan, Pancasila kembali menghadirkan diri sebagai pelita besar bagi kita semua dan sebagai perekat bangsa, ... sehingga, bagi Megawati, Pancasila hadir sebagai solusi kebangsaan, ... dari sinilah kita mengerti suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub dalam Trisakti (1964), yang digagas melalui perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, ... lanjutnya dengan mempertanyakan, bukankah sekarang kita melihat adanya kebenaran, bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak berdaulat sepenuhnya? ... Oleh karenanya, Megawati menegaskan agar peringatan Pancasila 1 Juni lebih merupakan jalan baru, jalan ideologis untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada hati nurani rakyat”.

Nampak jelas, pada saat itu, Megawati Soekarnoputri menekankan kondisi yang tengah dialami bangsa Indonesia, betapa untuk memenuhi kebutuhan baik pangan, energi dan juga upaya untuk memberikan perlindungan kepada tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia, belum menunjukkan kedaulatannya sebagai sebuah bangsa. Kegelisahan Megawati tersebut menunjukkan kerinduannya terhadap gagasan besar Bung Karno yang dengan tegas menolak negara yang lemah dan negara yang masih tergantung pada negara lain, sehingga ia mengingatkan kita agar kembali pada gagasan Trisakti Bung Karno.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bagaimana politik itu dijalankan demi kepentingan masyarakat, sebagaimana Yuwono menyebut-

kan (Yuwono Sudarsono: 18-19); politik adalah mekanisme untuk memecahkan masalah dan bukan suatu tujuan tersendiri --- penekanan pada program-program kesejahteraan dan akhirnya pengakuan akan suatu bentuk tertentu dari partisipasi massa.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. KH. Said Aqil Siroj, menyampaikan pidato “Menegakkan Kembali Pancasila”, pada peringatan hari lahirnya Pancasila (Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani, 2012:82) mengemukakan; “Peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk penegasan kembali komitmen kita pada Pancasila. Penegasan Pancasila ini merupakan langkah strategis, karena, dengan sendirinya merupakan penegasan pada UUD NRI 1945 dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, baik secara geografis, politik, ekonomi dan budaya. Penegasan Pancasila juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhineka Tunggal Ika yang merupakan pilar bangsa ini.”

Selanjutnya, Prof. Dr. M. Din Syamsudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pidato “Pidato Kebangsaan Negara Pancasila: Baituna Jannatuna” yang disampaikan pada peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2011, (Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani, 2012:91) mengemukakan; “Secara teoritis, Pancasila dapat membawa bangsa ke kemajuan dan keunggulan. Namun, selama ini, permasalahan yang terjadi di Indonesia terletak pada kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa secara nyata, serta kegagalan negara dalam mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem dan budaya bernegara (*state culture*). Masih terdapat paradoks pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti, kecenderungan akomodasi dan aplikasi nilai-nilai dalam praksis sosial, ekonomi, dan politik. Akibatnya, cita-cita Trisakti Bung Karno “berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya” nyaris jauh panggang dari api.”

Setelah ditetapkan menjadi calon presiden pada pilpres 2014, Jokowi dalam dokumen visi misinya menjabarkan gagasan Trisakti kedalam Nawacita sebagai strategi umum pemerintahannya. Gagasan ini merupakan penjabaran dari

nilai-nilai besar yang dilandasi atas tiga problem pokok bangsa dalam perjuangan mencapai tujuan nasional yang dihadapkan pada tiga persoalan utama, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa ([www. KPU.go.id](http://www.KPU.go.id)).

Gagasan Nawacita Jokowi lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Sehingga, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Oleh karena itu, Nawacita dijadikan sebagai program utama atau tujuan dari pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan pemerintahannya.

Sementara itu, dalam penelitian ini, penulis lebih menyoroti pada persoalan yang dihadapi pemerintah Jokowi untuk dapat mengimplementasikan Nawacita baik di bidang politik, ekonomi maupun budaya. Penulis melihat, persoalan yang saat ini terjadi di bidang politik, pemerintah dihadapkan dengan polemik yang terjadi antar kelas buruh dan pengusaha (pemilik pabrik) --- dengan munculnya demonstrasi buruh-buruh industrial di tiap-tiap kota yang mulai menuntut hak-hak ekonomi dan politiknya yang terkait dengan perbaikan tingkat upah yang sangat rendah. Sementara itu, di bidang ekonomi, pemerintah dihadapkan pada ketimpangan pembangunan yang lahir akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi bagi daerah terhadap pusat dan tingkat kesenjangan sosial yang tertinggi dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dampaknya, pemerintah dihadapkan pada persoalan intoleransi. Masyarakat tidak lagi mengakui keberagaman dan pluralisme bangsa Indonesia, sehingga terjadi konflik antar agama, antar suku dan ras. Oleh karena itu, bagi Jokowi, tiga gagasan besar Trisakti diterjemahkan sebagai strategi umum dalam pelaksanaan program pemerintahan yang kemudian dijabarkan dalam strategi khusus Nawacita.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus tunggal (Nawawi, 2003:1) dengan pendekatan Strategi Pembangunan Politik A.F.K. Organsky dan teori kepentingan nasional Donald E Neuchtheirlein untuk menjadi dasar dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan tentang gagasan Trisakti Soekarno dan Nawacita sebagai

Strategi Khusus dalam pemerintahan Jokowi.

Walaupun ada pendapat yang berbeda tentang Kepentingan Nasional dari Rozeta E. Shembilku (2004:11-12), jelas menekankan bahwa terdapat dua istilah ketika kita berbicara tentang kepentingan nasional, sehingga ia menjabarkan tentang adanya ambiguitas dalam memaknai istilah kepentingan nasional tersebut jika disandingkan kepentingan nasional dengan kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, kepentingan nasional tidak menggambarkan adanya pedoman yang jelas sehingga mengakibatkan adanya nasionalisme yang sempit. Namun, bagi penulis Neuchtherlein sangat berbeda dalam memaparkan kepentingan nasional sehingga sangat layak untuk digunakan untuk mengkaji persoalan gagasan nawacita Jokowi.

Gagasan Nawacita Jokowi Sebagai Strategi Khusus dari Gagasan Trisakti Soekarno

Pada 17 Agustus 1964, merupakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, sebagai Presiden RI pertama menyampaikan pidato yang merupakan buah pemikirannya dan diberi judul TAVIP "Tahun Vivere Pericoloso" yang di dalamnya terkandung tiga konsep besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar baik secara politik, ekonomi maupun budaya, "Trisakti". Sementara, pada pentas perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, Jokowi mengajukan dokumen Visi Misi-nya Nawacita (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Dalam merumuskan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia di era 65-67, Bung Karno menegaskan persoalan yang kala itu harus dapat diselesaikan oleh bangsa Indonesia terletak pada tiga hal, yakni; politik, ekonomi dan budaya --- sebuah strategi yang diambil pada pemerintahan Bung Karno untuk memperkuat nasionalisme Indonesia. Gagasan tersebut merupakan wujud dari strategi umum, sebuah pemerintahan yang pada masa pemerintahannya belum dijabarkan dalam pelaksanaan program-program seperti apa yang harus dilakukan pada masing-masing bidang yang menjadi hambatan bagi pembangunan bangsa.

Perubahan bentuk Trisakti ke Nawacita sebagai sebuah gagasan yang mencoba mem-

bangun kembali fondasi pembangunan yang berdasarkan pada filosofi dasar pembangunan, yakni pemerataan. Perubahan ini dapat dilihat sebagai perluasan rumusan gagasan yang memiliki tiga rumusan konsep yang diperluas ke Nawacita menjadi sembilan rumusan konsep.

Bentuk rumusan gagasan Trisakti yang terdiri dari 1). berdaulat dalam politik, 2). berdikari dalam ekonomi dan 3). berkepribadian dalam budaya. Kemudian diperluas dalam bentuk rumusan gagasan Nawacita yang terdiri 31 program yang dibagi dalam tiga bidang, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya dengan sembilan program prioritas utama, yakni dari 1). Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, 2). Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3). Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 4). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, 5). Membangun Indonesia dari pinggiran, 6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, 7). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, 8). Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, dan 9). Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Wasisto Raharjo Jati (Raharjo Jati:2015), menyatakan; "Nawacita merupakan perluasan bidang dari apa yang disebut Bung Karno sebagai tiga (3) bidang yang menjadi sembilan bidang yakni polugri, kemandirian pangan, sains dan sebagainya. Sementara, Jokowi melihat bahwa 6 bidang selain polugri itu praksis dari Trisakti yang diimplementasikan.

Baginya "Nawacita sebagai fondasi utama untuk mereformasikan kembali pembangunan Indonesia, karena pembangunan sekarang ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi, sementara, waktu itu, Bung Karno dengan Trisakti mengedepankan pemerataan ekonomi. Begitu juga dalam aspek infrastruktur program pembangunan yang selama ini dibentuk mengacu pada materialisme,

sementara, Trisakti Bung Karno dialektis” (Raharjo Jati:2015).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka, transformasi Trisakti ke Nawacita adalah tiga poin besar Trisakti yang diperluas dengan penambahan enam poin lainnya. Sementara, sebagai filosofi dasar yang dibentuk, konsep dimaksud Jokowi merujuk pada filosofi dasar pembangunan yang bagi Bung Karno melalui Trisakti sebagai konsep pemerataan ekonomi yang didasari atas pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan.

Arief Budimanta menguraikan (Arief Budimanta, 2015);” Nawacita itu adalah instrumen dari implementasi Trisakti, jadi ibaratnya, Trisakti adalah suatu strategi umum, sedang Nawacita adalah langkah-langkah taktis, agar strategi itu tercapai.

Wasisto Raharjo Jati menegaskan, “Pada 65-70, Trisakti dibumihanguskan, sehingga, menjadi *“tahun alpa sejarah”*. Orde Baru menggerakkan beberapa artis, seniman dan intelektual untuk mendekonstruksikan bahwa Trisakti itu adalah produk gagal. Pancasila didemistifikasi dan hanya menjadi hafalan, begitu juga Trisakti”. (Raharjo Jati,2015).

Pernyataan tersebut diartikan, sudah sekian lama nilai-nilai ideologi dihilangkan dan dibumihanguskan sehingga penggalan kembali Pancasila sebagai landasan atau pedoman bagi pemerintah untuk bisa mengatur hubungan kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan budaya melalui Trisakti, sebagai sebuah rumusan pelaksanaan dari ide besar Pancasila kian tergerus. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang Pancasila, maka, kita berbicara mengenai *groundslag philosphia*, sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai Ideologi yang mengatur secara rinci arah dan tujuan negara atau cita-cita bangsa dan negara Indonesia, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan atau keamanan dan pertahanan, yang mengatur hubungan ekonomi, mengatur hubungan politik, dan mengatur hubungan kita di teritorial wilayah internasional. Secara tegas dapat dikatakan, sebagai arah bagi pemerintah untuk menentukan jalannya pemerintahan.

Sementara Dwi Rio Sambodo (2014:12) mengemukakan; ideologi Pancasila pada gilirannya hanya dijadikan alat untuk melanggengkan

kekuasaan (Orde Baru) yang memakan banyak korban anak bangsa: rakyat terkotak-kotak dalam bingkai suku dan agama, politik adu domba menjadi biasa. Antar kelompok saling bermusuhan, bahkan saling membunuh. Antar komponen saling curiga, tak ada lagi saling percaya

Implementasi program Nawacita periode 20 Oktober 2014-20 Oktober 2015

Implementasi Nawacita Jokowi dalam perspektif pembangunan politik dapat ditinjau dengan pendekatan konsep teori yang diusung A.F.K Organsky, strategi pembangunan politik dibagi kedalam empat tahapan perkembangan pembangunan politik negara bangsa (lihat Afan Gaffar, hal 34-35, Yuwono Sudarsono, hal 18-19, lihat juga Yahya Muhaimin & Colin McAndrews, hal 7.), sebagai berikut:

1. Fase yang disebut Organsky sebagai Politik Kesatuan Primitif (*Political of Primitive Unification*)

Sejak lahirnya reformasi, persoalan intoleransi kian merebak dan menggerogoti nilai-nilai budaya yang telah menjadi warisan leluhur bangsa. Menurut Soepriyanto (2008:3), kata reformasi merupakan upaya perombakan dan penataan dari tatanan lama (*Dismantling the Old Regime*) menuju suatu tatanan baru yang lebih egaliter, demokratis, berkeadilan sosial dan ditegakkannya supremasi hukum, mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia *“reconstructing the new Indonesia”*.

Harapannya, dengan terciptanya keadilan social dan ditegakkannya supremasi hukum serta masyarakat disejahterakan, maka, persoalan intoleransi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, selain untuk membentuk karakter bangsa, pemerintahan Jokowi menekankan program restorasi budaya dan partisipasi pemuda untuk memperkecil persoalan intoleransi.

Hal ini juga dikemukakan Dwi Rio Sambodo (2014:15-16), setidaknya, pengaturan tentang kebudayaan melalui kontruksi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) telah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Namun demikian, di era pemerintahan Jokowi persoalan intoleransi dan

krisis kepribadian baik persoalan konflik suku, konflik agama (Tolikara dan Singkil), bahkan konflik antar lembaga pemerintah semakin masif. Menurut hemat penulis, dalam kondisi ini, pemerintah Jokowi dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan yang telah lama menjadi problem bangsa sebagai upaya merekonstruksi Indonesia yang baru.

2. Politik Industrialisasi (*The Politics of Industrialization*)

Sebagaimana kita ketahui, gagasan Trisakti Bung Karno yang didengungkan Jokowi sebagai pedoman dan arah dari pemerintahannya yang tertuang dalam dokumen visi & misi saat pencalonannya sebagai presiden, pada prinsipnya, ingin menjadikan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu, dalam pemerintahannya, upaya untuk mengimplementasikan program-program tersebut dituangkan dalam gagasan Nawacita yang pada hakikatnya adalah penolakan terhadap neoliberalisme dan neokapitalisme baru.

Hal tersebut di atas mengingat substansi gagasan Trisakti Bung Karno terletak pada kemandirian bangsa Indonesia yang mandiri dalam pengertian tidak menggantungkan nasib bangsa kepada negara manapun, mandiri dalam mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya dari cengkeraman negara manapun, termasuk Amerika. Untuk itu, maka, dibutuhkan suatu strategi sebagai langkah merealisasikan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi pemerintahannya yang disebut Nawacita.

3. Politik Kesejahteraan Nasional (*The Politics of National Welfare*)

Visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Nawacita merupakan pedoman, arah bagi tercapainya tujuan pemerintah yang dapat diukur berdasarkan indikator-indikator pembangunan politik yang dilandasi kepentingan nasional suatu bangsa menuju negara sejahtera --- pada prinsipnya, ingin menjadikan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan --- yang pada hakikatnya menolak adanya neoliberalisme dan neokapitalisme baru.

4. Politik Kemakmuran (*The Politics of Abundances*)

Jika prasyarat pembangunan politik sebagaimana yang diidamkan Organsky dengan mengedepankan perkembangan politik yang bergerak linier dari tahap satu ke tahap berikutnya yang ditandai dengan kestabilan politik, maka, perkembangan pembangunan politik di Indonesia bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang digambarkan Organsky. Sebab, pembangunan politik hanya memberikan ruang bagi risiko instabilitas yang menghambat proses pembangunan ekonomi industri. Sementara, prioritas pemerintah untuk kemakmuran bangsa dan negara tidak bisa direalisasikan semuanya.

Strategi Pemerintahan Jokowi Dalam Mengimplementasikan Nawacita Di Bidang Kedaulatan Politik

Nawacita, sebagai suatu strategi khusus pemerintahan Jokowi diwujudkan dalam “program aksi” atau “action plan” demi meningkatkan kesejahteraan rakyat agar dapat diimplementasikan atau tidak, hal demikian dapat ditinjau dari perspektif kepentingan nasional sebagaimana pandangan Donald E Neuchterlein dalam (William Simon, 2012:33), untuk memenuhi pembangunan politik nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, Kepentingan Keamanan:

Komitmen Nawacita dalam bidang kedaulatan politik adalah untuk mengatasi terjadinya ketimpangan antara rakyat dengan pemerintah sebagai akibat dari belum terpenuhinya hak-hak warganegara, seperti cabang-cabang produksi yang dikuasai dan dikelola oleh swasta asing dan juga pemerintah yang tidak pro-rakyat, dengan lebih mengedepankan peran pasar (monopoli modal asing). Akibatnya, rakyat hanya sekadar pekerja biasa yang tidak memiliki hak atas pengelolaan maupun penguasaan sumber daya alam.

Di era pemerintahan Jokowi, persoalan buruh dan pengusaha menjadi “*action plan*” pemerintahannya. Buruh yang merasa hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, terutama upah yang layak. Hal ini berakibat pada bentuk protes tuntutan kenaikan upah pada tiap tahunnya, sehingga, memberatkan perusahaan (pemilik modal), yang pada akhirnya dapat membuat perusahaan bangkrut. Jika hal ini

terjadi, maka, akan melahirkan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi dengan Nawacita-nya dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Permasalahan ini dipaparkan Menteri Tenaga Kerja di Rapat Kerja Nasional (Raker-nas) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat "Almisbat" (Dhakiri, 2015:6) bahwa: "a. Pengusaha cenderung memberlakukan upah minimum sebagai upah standar di perusahaan, b. Pekerja menganggap upah minimum belum dapat meningkatkan kesejahteraannya, sehingga, mereka cenderung menuntut kenaikan upah minimum yang relatif tinggi.

Selanjutnya, agar dapat mempertahankan kedaulatan politik dalam konteks bangunan ekonomi, maka, pemerintah membutuhkan investasi besar-besaran untuk mengakselerasi pertumbuhan industri padat karya demi peningkatan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintahan di era Jokowi harus segera mengambil sikap untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini seiring dengan poin ke lima Nawacita, "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia".

Berdasarkan pada konsep penghasilan yang layak, maka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, (Dhakiri, 2015). Bagi pemerintah, PP ini adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat, serta dapat mengatur pengupahan secara menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha.

Namun, di sisi lain, buruh menganggap, sejatinya, substansi pengupahan bukanlah formula untuk menyejahterakan. Melainkan, merupakan kebijakan yang akan memiskinkan kaum buruh dan rakyat Indonesia --- apa lagi, pemerintah tidak melibatkan serikat buruh di dalam perundingan sistem pengupahan. Bagi kaum buruh, satu tahun pemerintahan Jokowi, khususnya pada sektor ketenagakerjaan, belum ada realisasi yang nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Presiden KSBSI Mudhofir (<http://news.metrotvnews.com>) dalam diskusi 'Mengawal Kebijakan Perburuhan Pemerintahan Jokowi-JK' di Gedung Juang, Jakarta Pusat, mengatakan; "Jika kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam kepe-

mimpinannya tidak pro terhadap buruh, maka, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukan koreksi terhadap arah kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, serikat buruh yang dulu menjadi pendukung pasangan presiden dan wakil terpilih siap melakukannya."

Pramono Anung (<http://www.pikiran-rakyat.com>) menjelaskan, formula penghitungan upah yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V yang berdasarkan perhitungan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dikalikan laju inflasi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sudah sangat tepat.

Dalam konteks ini, penulis menilai, bahwa kebijakan pemerintah tentang UU Pengupahan merupakan strategi khusus untuk menjaga keseimbangan kedaulatan politik pemerintah dari aksi massa buruh yang hampir tiap tahun melakukan aksi tuntutan terhadap upah penghidupan yang layak, serta menjaga agar investor yang hendak menanamkan modal investasi di Indonesia tidak merasa khawatir dengan adanya gangguan dari aksi massa tersebut. Bagi pemerintah, pembangunan politik membutuhkan politik yang kuat dan kestabilan politik, serta pencapaian ekonomi yang tinggi dan merata yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah mengeluarkan PP tentang pengupahan adalah merupakan suatu produk politik hukum yang digunakan pemerintah demi menjaga kedaulatan politik pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sehingga, secara politik pemerintah bisa berdaulat. Namun demikian, penulis menilai, upaya menjaga kedaulatan politik pemerintahan ini tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan Bung Karno dalam konsep Trisaktinya, sehingga implementasi Nawacita dalam bidang ini paradoks dengan trisakti atau dengan kata lain "Paradoks Ideology".

Kedua, Kepentingan Ekonomi:

Dalam konteks kepentingan ekonomi, pro kontra antara buruh dan pemerintah terkait PP No. 78 tahun 2015 sebagai upaya mewujudkan dukungan atas kesejahteraan, kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat dalam pemenuhan ekonomi. Dalam hal ini, masing-masing pihak,

memiliki persepsi yang berbeda terhadap PP 78 tersebut.

Menurut hemat penulis, baik tuntutan buruh maupun kebijakan pemerintah sama-sama menuai dan memperhitungkan kepentingan masyarakat secara umum. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu disepakati bersama di antara ke-duanya, sehingga, pewujudan ekonomi mampu menopang kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan.

Selain itu, pemerintah, dalam hal mengambil kebijakan yang terkait dengan kemaslahatan bagi pekerja atau buruh perlu memberikan ruang bagi buruh untuk turut serta dalam mendesain kebijakan yang terkait langsung dengan kebutuhan dasarnya. Sebagaimana kita ketahui, pelibatan buruh adalah upaya untuk memetakan persoalan dasar yang dihadapi buruh sebagai pekerja yang benar-benar merasakan apa yang terjadi dan dirasakan oleh buruh, sehingga, pelibatan dan pemberian peran kepada buruh menjadi sangat penting.

Ketiga, Kepentingan Tatanan Dunia:

Program aksi Nawacita dalam menghadapi persaingan perekonomian dan dunia usaha, Jokowi berjanji di bidang kedaulatan politik angka satu (1) “membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global,” dan angka sebelas (11) “mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan”, sehingga, untuk dapat mengimplementasikan programnya, pemerintah menggunakan strategi khusus dalam penanganan persoalan yang dihadapi buruh dan pengusaha melalui PP No. 78 tahun 2015, serta menyiapkan strategi dasar peningkatan produktivitas.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini, Nawacita dihadapkan dengan persaingan global yang sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga, Indonesia tidak bisa menutup diri dari dunia luar. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing dengan dunia luar. Hal demikian, dikemukakan Wandu Tuturong (Wandu Tuturong, 2015) sebagai berikut:

“Penguatan peningkatan daya saing, intinya bagaimana kita masuk dalam perdagangan global. Kalau saya, Soekarno di zaman sekarang bukannya kita mengisolasi diri, melainkan, kita masuk kepasar dan kuasai pasar itu, serta menjadi

pemenangnya. Caranya, bagaimana kita mempersiapkan strategi, penguatan infrastruktur dan lain-lain supaya tidak didikte asing. Jadi, dengan menggunakan alat musuh untuk mengalahkan musuh. Karena globalisasi itu sudah tidak terelakkan lagi, jadi, yang harus dilakukan adalah memperkuat diri supaya dalam perang ”dagang” kita menang.”

Namun demikian, Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai; (<http://news.okezone.com>) PP tentang Pengupah-an adalah produk politik upah murah yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK agar kemiskinan bisa dilakukan secara sistemik dan hanya memuaskan kalangan investor rakus yang akan mengeksploitasi SDA dan SDM Indonesia jelang MEA Desember 2015.

Sejatinya, kebijakan ini lebih memberikan peluang dan kepastian kepada investor untuk mendirikan industri di tanah air dan investor tidak ragu dalam menanamkan modalnya. Langkah ini sebagai wujud kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi dalam memuluskan investasi asing untuk dapat menanamkan modalnya bagi pembangunan industri dalam negeri.

Keempat, Kepentingan Ideologi:

Sebagaimana kita ketahui, Nawacita, sebagai gagasan yang merupakan turunan dari gagasan Trisakti dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melalui “program aksi”, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi I-V. Dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini, maka, pemerintah Jokowi menargetkan akan merombak peraturan-peraturan yang dapat menghambat daya saing industri nasional. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi akan berusaha mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Namun demikian, pemerintahan Jokowi dengan jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap sistem ekonomi yang dianutnya, yakni kebijakan yang terlalu banyak mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar serta mencegah monopoli. Bahkan, dalam upaya memacu laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing serta kebijakan anggaran ketat, ter-

masuk menghapuskan subsidi dan terakhir menetapkan upah minimum melalui PP No. 78 tahun 2015.

Berkait dengan yang tersebut di atas, maka, kebijakan pemerintah Jokowi mengindikasikan menganut sistem ekonomi liberal. Akibatnya, amanat Nawacita yang digadang-gadang sebagai strategi khusus dari pelaksanaan strategi umum Trisakti, menjadi berbanding terbalik (terjadi paradoks ideologi). Dengan kata lain, Indonesia menuju sistem Liberal atau Liberalisasi, padahal, Trisakti lebih mengedepankan kepentingan yang berdasarkan atas kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tidak mengabaikan sistem ekonomi sosialisme ala Indonesia.

Strategi Pemerintahan Jokowi dalam Mengimplementasikan Nawacita di Bidang Kemandirian Ekonomi

Salah satu poin gagasan Nawacita di era pemerintahan Jokowi adalah membangun dari pinggiran. Apabila ditinjau dari perspektif kepentingan nasional Donald E Neuchterlein dalam (Wiliam Simon, 2012:33), untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan politik di era pemerintahan Jokowi, maka, dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, Kepentingan Keamanan (Defence Interests):

Poin ketiga Nawacita, strategi dan orientasi pemerintahan Jokowi untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan akan semakin melebar. Kebijakan yang *urban oriented* dinilai hanya menguntungkan kawasan perkotaan dan meminggirkan kawasan pedesaan, akibatnya, kesenjangan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan semakin melebar.

Selanjutnya, secara sederhana, program membangun dari pinggiran diartikan sebagai kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pengembangan atau pembangunan di daerah dan desa-desa yang dilakukan secara massif dan berimbang. Pembangunan di desa, (www.suara-pemredkalbar.com) diharapkan dapat memberikan dampak terhadap wilayah di sekitarnya atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintahan secara berjenjang --- dalam hal ini,

kehadiran negara dituntut untuk turut memperkuat wilayah-wilayah pinggiran melalui pembangunan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana bagi daerah-daerah yang terpinggirkan dan berbatasan dengan negara lain. Pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi di antaranya adalah pembangunan jalan, meliputi jalur darat, jalur udara maupun jalur laut, pembangunan waduk dan irigasi.

Strategi pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi menuju negara berkesejahteraan diarahkan pada pembangunan di luar Jawa, dan pembangunan ini akan merata keseluruh penjuru Indonesia (www.kemenpora.go.id). Realisasi pembangunan seperti tol trans Sumatera, tol trans Jawa, pos lintas batas Entikong, Kalimantan, Bendungan Tanju di NTT, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan tol trans Papua.

Program aksi Nawacita dituangkan pemerintahan Jokowi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 (www.kemenpora.go.id). Adapun, strategi anggaran dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,77 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten dan kota. Namun demikian, mekanisme penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahapan; penyaluran tahap pertama dialokasikan sebesar 40 persen dan disalurkan pada April 2015, sementara, pada Agustus dilakukan penyaluran tahap kedua sebesar 40 persen, dan pada tahap ketiga dialokasikan sebesar 20 persen yang disalurkan pada Oktober.

Menurut hemat penulis, pembangun dari pinggiran adalah sebagai cara Jokowi mengatasi kesenjangan pembangunan dengan melakukan pemerataan pembangunan pusat-daerah, bentuknya adalah membangun konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Tujuan dari penguatan akses penghubung ini tidak lain, agar tiap daerah dapat terintergasi oleh seluruh moda transportasi. Dengan demikian, akan tercipta kemandirian daerah yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi bangsa dan negara serta kemakmuran bangsa. Hal tersebut selaras dengan Coen Husein Pontoh (Pontoh:2014,ix); sebagai penyelesaian masalah keterbelakangan dan ketergantungan ekonomi Indonesia secara esensial tidak terletak pada pembenahan kelembagaan yang

bersifat teknokratik.

Kedua, Kepentingan Ekonomi (*Economic Interests*);

Komitmen Jokowi dalam membangun daerah sejalan dengan poin ketiga Nawacita, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Di sini, Jokowi menilai masih minimnya pembangunan di wilayah pinggiran sebagai akibat dari pembangunan yang menitikberatkan pada pusat dan daerah (khususnya daerah perkotaan) sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini bisa diartikan sebagai adanya perubahan *mindset*, bahwa pertumbuhan ekonomi yang semula terkonsentrasi di pusat, berubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah-daerah.

Selanjutnya, membangun dari pinggiran memiliki semangat ekonomi, sebab, dengan adanya pembangunan di daerah-daerah, maka, pola distribusi pasti akan berubah. Pola distribusi yang semula menitikberatkan distribusi dari pusat ke daerah menjadi distribusi dari daerah ke pusat, sehingga, pertumbuhan ekonomi di daerah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah serta dapat mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Seirama dengan hal tersebut, (Swasono,1997:3) mengatakan; negara memiliki tanggungjawab untuk merancang dan menjamin bahwa seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang pangan dan kebutuhan pelayanan berupa pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana pandangan Bung Karno, bahwa rakyatlah yang berdaulat, bukan pasar --- sebab, apabila dibiarkan bebas, maka, pasar (Daulat Pasar) akan menggusur keaulatan rakyat

Selaras dengan yang tersebut di atas, maka, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah Jokowi dalam mengimplementasikan poin ketiga Nawacita merupakan upaya untuk membangun pemerataan ekonomi dan pertumbuhan wilayah dengan menghadirkan kemudahan koneksitas hubungan antar daerah dan meningkatkan pertumbuhan daerah termasuk desa-desa. Semangat yang terlihat dari pembangunan daerah pinggiran, selain pemerataan, juga bisa dilihat sebagai semangat untuk memperkecil

biaya atau ongkos pendistribusian barang-barang yang dipasarkan daerah-daerah, sehingga, biaya pendistribusian menjadi murah dan mudah. Di sinilah tercipta semangat menjadikan ekonomi yang mandiri bagi bangsa atau kemandirian ekonomi.

Ketiga, Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order Interests*):

Sebagaimana diketahui, (<http://nasional.sindonews.com>) Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste), serta laut dengan 10 negara (India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia). Dengan kata lain, terdapat 16 kabupaten/ kota di Indonesia yang berbatasan darat dengan negara lain.

Komitmen Jokowi dalam membangun dari pinggiran lebih menitikberatkan pada pembangunan di kawasan perbatasan, karena, sampai saat ini, kawasan perbatasan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Walau kawasan perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi geopolitik dan kawasan yang berada pada posisi perbatasan adalah kawasan Timur Indonesia, maka, agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan, perlu adanya pembangunan kawasan timur agar seimbang atau setara dengan kawasan barat.

Oleh sebab itu, pembangunan daerah perbatasan juga menjadi perhatian dari pemerintah melalui program aksi Nawacita dan sekaligus antitesis dari pola pembangunan periode pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah bersiap untuk membangun daerah perbatasan baik dalam membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan menggenjot pembangunan infrastruktur jalan sebagai penghubung bagi jalur lintas batas tersebut. Dengan pembangunan akses tersebut, diharapkan dapat membangkitkan perekonomian wilayah perbatasan dan meningkatkan perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia bisa mandiri secara ekonomi.

Selanjutnya, program aksi Nawacita bidang pembangunan daerah pinggiran ini merupakan strategi khusus dalam mengantisipasi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, sebab, dalam program aksinya, Nawacita menyiapkan infrastruktur di daerah-daerah pinggiran termasuk

wilayah perbatasan sebagai sebuah bangunan ekonomi yang berdaya saing nasional maupun internasional. Hal tersebut mengingat, dengan adanya MEA, masyarakat harus siap untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Oleh karena itu, strategi Nawacita membangun daerah pinggiran adalah sebagai wujud membentuk masyarakat yang mampu bersaing, makmur dan sejahtera.

Keempat, Kepentingan Ideologi (Ideological Interests):

Sebagaimana kita ketahui bersama, membangun dari pinggiran dimaknai juga sebagai pembangunan sumber daya manusia yang selama ini terpinggirkan dan kurang mampu secara ekonomi. Oleh sebab itu, program aksi Nawacita sebagaimana dikemukakan Arief Budimanta (Budimanta, 2015)

“Nawacita adalah wujud nyata dari apa yang kita sebut sebagai working ideologi, oleh sebab itu ia akan menjadi satu konsep manajemen pembangunan.”

Sidarto Danusubroto mengemukakan; (Danusubroto, 2015) “Negara ini bertahan selama 70 tahun karena pendiri bangsa secara bijak menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yaitu negara kebangsaan, negara berketuhanan, negara yang pro-keberagaman. Namun demikian, belakangan ini, kondisi bangsa menunjukkan adanya defisit Pancasila.”

Merujuk pada yang tersebut di atas, sejatinya, pembangunan yang merata diseluruh wilayah daerah-daerah terpinggirkan adalah merupakan perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan pembangunan yang sebelumnya hanya terpusat di daerah Jawa, dalam program aksi Nawacita, pembangunan dilakukan pada daerah-daerah pinggiran dan perbatasan sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Strategi Pemerintahan Jokowi dalam Mengimplementasikan Nawacita di Bidang Kepribadian Budaya.

Untuk dapat menilai bagaimana komitmen dan implementasi pemerintah dalam melakukan revolusi karakter, apabila dilihat pada bingkai kebhinekaan dapat ditinjau dari perspektif kepentingan nasional dengan meminjam Donald E Neuchterlein dalam (William Simon, 2012:33) se-

bagai berikut:

Pertama, Kepentingan Keamanan (Defence Interests);

Sebagaimana diketahui, program aksi Nawacita dalam memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial berlandaskan pada nilai-nilai gotong royong (<http://print.kompas.com>) --- yang menjadi nilai fundamental bangsa --- yang seharusnya dimaknai sebagai sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan pembangunan, kini, kian lama kian tergerus dan memudar.

Oleh sebab itu, untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dalam kerangka revolusi mental, menurut Yudi Latif dalam artikelnya yang berjudul “Mental Pancasila” menyebutkan terdapat tiga ranah revolusi (<http://print.kompas.com>) yakni : “Pertama, Revolusi (basis) material Kedua, Revolusi (superstruktur) mental-kultural, Ketiga, Revolusi (agensi) politikal

Dalam menyikapi keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sidarto Danusubroto mengungkapkan; (Danusubroto,2015) “NKRI ini hidup dari keberagaman, “Bhineka Tunggal Ika”, kita beda suku, beda kulit, dan beda bahasa. Jadi, kekuatan kita sebagai negara adalah pada keberagaman, agama dan bahasa yang harus selalu dirawat. Sekali kita tidak mampu merawatnya, maka, NKRI hanya tinggal sejarah. NKRI bisa survive tujuh puluh tahun karena kita punya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sehingga, tidak ada lagi sekat-sekat antar bangsa.”

Setahun pemerintahan Jokowi, persoalan yang dihadapi adalah kebhinekaan Indonesia. Pelbagai fakta menyajikan, kejadian kerusuhan Tolikara dan Aceh Singkil adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi dalam mengimplementasikan restorasi karakter. Oleh karena itu, tidak ada kata lain, untuk memperkokoh kedaulatan politik Indonesia baik dari ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, Nawacita, dalam konteks restorasi sosial harus benar-benar diimplementasikan sehingga rasa kebhinekaan kita tetap terjaga dalam bingkai NKRI dan Pancasila.

Kedua, Kepentingan Ekonomi (Economic Interests);

Jokowi menyebutkan (<http://news.detik.com>) “Selama ini, kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal, kalau kita cermati lebih saksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.”

Untuk membangun nilai-nilai budaya bangsa, maka, diperlukan pembangunan yang merata, yakni pembangunan mental. Hal ini dikemukakan Arief Budimanta (Budimanta, 2015); “Pembangunan nasional itu bukan hanya pembangunan fisik, akan tetapi, juga menyangkut pembangunan mental. Jadi, pembangunan nasional juga harus menjadi satu strategi perencanaan yang melingkupi unsur perubahan mental atau karakter bangsa ini harus selalu berjalan seiring.”

Wasisto Raharjo Jati mengemukakan, saat ini (Raharjo Jati, 2015) “Kebiasaan masyarakat cenderung instan dan selalu ingin cepat, mereka tidak melihat sesuatu yang bersifat ideologis karena sudah usang. Sementara, untuk membangun sebuah bangsa, apalagi berorientasi pada yang besar dan maju, mau tidak mau, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, kerja ideologis juga harus turut dilaksanakan. Adapun, tantangan berikutnya adalah, kita menghadapi masyarakat yang pragmatis. Itu yang menjadi PR besar kita.”

Ketiga, Kepentingan Tatanan Dunia (World Order Interests);

Meminjam Arief Budimanta (Budimanta, 2015); untuk mengimplementasikan Nawacita, kuncinya adalah sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing harus meningkat, masyarakat Indonesia harus memiliki kecerdasan, masyarakat Indonesia yang memiliki etos kerja tinggi, masyarakat Indonesia yang berintegritas tinggi dan gotong royong, artinya memiliki semangat jiwa yang pluralism, memiliki semangat berkorban bekerjasama membangun bangsa, ada jiwa patriot atau *character and nation building* atau biasa disebut revolusi mental. Untuk membentuk bangsa yang berkepribadian atau bangsa yang memiliki jati diri sebagai bangsa harus kembali pada apa yang disebut Soekarno sebagai Kepribadian dalam Budaya. Dengan kondisi yang saat ini, maka, penting arti-

nya suatu pemerintahan untuk meneguhkan kembali cita-cita yang diperjuangkan oleh *Founding Fathers* sebagai peletak dasar budaya bangsa.

Kenyataan itu terjadi karena era globalisasi sangat mempengaruhi keberlangsungan nilai-nilai budaya bangsa yang berakar pada budaya nenek moyang kita. Ekspansi budaya kapitalisme akan mempengaruhi apa yang disebut sebagai budaya materialistis yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konsumerisme, dan pada akhirnya, masyarakat kita hanya akan menjadi penikmat produk-produk barat. Ancaman terhadap budaya bangsa semacam ini melahirkan apa yang disebut sebagai bangsa yang tidak memiliki kepribadian.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Nawacita, menekankan pada kemajuan bangsa yang tidak hanya dicerminkan melalui ekonomi semata. Namun, memiliki cakupan aspek yang lebih luas, mencakup kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Sehingga, kita tidak terjebak pada pragmatisme politik dan budaya hedonisme.

Dalam konteks ini, implementasi Nawacita diarahkan pada pembangunan karakter bangsa, revolusi mental adalah upaya untuk menangkal arus globalisasi yang kian merangsek masuk dan menggerogoti nilai-nilai budaya yang telah bertahan begitu lama dalam bingkai NKRI.

Keempat, Kepentingan Ideologi (Ideological Interests);

Sidarto Danusubroto mengemukakan (Danusubroto, 2015) “Negara ini bertahan selama 70 tahun karena pendiri bangsa secara bijak menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yaitu negara kebangsaan, negara berketuhanan, negara yang pro-keberagaman. Namun demikian, belakangan ini, kondisi bangsa justru menunjukkan adanya defisit Pancasila.”

Sementara, revolusi mental sebagai penggalan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan pada falsafah bangsa, Pancasila, dilakukan melalui birokrasi, sejatinya, hal tersebut sebagaimana pandangan yang dikemukakan Wandi Tuteurong (Tuteurong, 2015); “Revolusi mental adalah sesuatu yang kita butuhkan, kalau dalam konteks sekarang, bagaimana kita yang duduk dalam birokrasi dapat menjadi lebih professional, melayani, tidak korup, mau maju. Mau mengejar sesuatu yang Soekarno sebut sebagai *Nation and*

Character Building.”

Menurut hemat penulis, saat ini, *Nation and Character Building* perlu dititikberatkan pada pembangunan ideologisasi, mengingat, sampai saat ini, dalam sejarah bangsa, pembangunan ideologi kita tidak tuntas. Padahal, Pancasila, sebagai filosofi dasar bangsa Indonesia mengakui keberagaman baik suku, agama, ras dan budaya.

Secara tegas dapat dikatakan, semangat kebhinekaan sebagai wujud penghargaan terhadap multikulturalisme dan keberagaman suku, agama dan ras yang dimiliki bangsa ini harus dapat dikonkretkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar terus dapat menjaga kehidupan dengan keragaman, kesetaraan dan harmoni saling menghargai antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, bagi pemerintahan Jokowi, sangat penting artinya untuk dapat mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Simpulan

Sejatinya, perkembangan pembangunan politik di era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, telah melewati tiga fase yakni, “Politik Kesatuan Primitif, Politik Industrialisasi dan Politik Kesejahteraan Nasional”. Oleh sebab itu, jika prasyarat pembangunan politik mengharuskan perkembangan politik bergerak linier dari tahap satu ke tahap berikutnya yang ditandai dengan kestabilan politik, maka, perkembangan pembangunan politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan apa yang digambarkan Organsky. Sebab, pembangunan politik hanya memberikan ruang bagi risiko instabilitas yang menghambat proses pembangunan ekonomi. Padahal, prioritas pemerintah untuk kemakmuran bangsa dan negara tidak bisa direalisasikan semuanya.

Oleh sebab itu, saat menjalankan roda pemerintahannya, dalam kedaulatan politik khususnya keamanan, Jokowi, menggunakan program Nawacita, di antaranya penguatan politik pemerintah dalam menghadapi persoalan buruh dan pengusaha dilakukan melalui strategi khusus; yakni dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah tentang UU Pengupahan agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan kedaulatan politik pemerintah --- sementara, untuk menjaga kestabilan ekonomi dilakukan dengan memberikan ruang kepastian

kepada investor dan memberikan penguatan-penguatan terhadap penyerapan pekerja atau tenaga kerja Indonesia serta pembangunan industrialisasi yang kompetitif dan berdaya saing di Indonesia --- kemudian, pada tatanan dunia baru; kebijakan PP tentang Pengupahan memberikan peluang dan kepastian kepada investor untuk mendirikan industri di Indonesia melalui pembangunan industri dalam negeri --- sedang pada ideologi; kebijakan pemerintah Jokowi mengindikasikan sistem ekonomi liberal yang dianut oleh pemerintahannya. Akibatnya, amanat Nawacita yang digadagadag sebagai strategi khusus dari pelaksanaan strategi umum Trisakti menjadi berbanding terbalik dengan Trisakti yang dicetuskan oleh Sukarno --- atau bisa dikatakan sebagai Indonesia menuju sistem Liberal atau Liberalisasi.

Selanjutnya, pada kemandirian ekonomi, khususnya keamanan: mengatasi kesenjangan pembangunan dilakukan lewat pemerataan pembangunan pusat-daerah, pembangunan konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Dengan begitu, maka, akan tercipta kemandirian daerah yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi bangsa dan negara serta kemakmuran bangsa --- sedang pada bidang ekonomi; melakukan pembangunan daerah pinggiran agar biaya pendistribusian menjadi murah dan mudah, agar tercipta ekonomi yang mandiri bagi bangsa atau kemandirian ekonomi --- sementara, pada tatanan dunia baru, menyiapkan infrastruktur di daerah-daerah pinggiran termasuk wilayah perbatasan sebagai sebuah bangunan ekonomi yang berdaya saing nasional maupun internasional.

Dengan kata lain, kehadiran Nawacita adalah untuk membentuk masyarakat yang mampu bersaing, makmur dan sejahtera --- pada ideologi, melakukan keadilan pembangunan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan --- sedang pada kepribadian budaya; kebhinekaan sebagai wujud penghargaan terhadap multikulturalisme dan keberagaman suku, agama dan ras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kekuatan budaya bangsa dalam menjaga keragaman, kesetaraan dan harmoni saling menghargai antar umat beragama di Indonesia untuk memperkuat kepribadian budaya bangsa.

Berkait dengan di atas, pada bidang ekono-

mi; pembangunan nasional sebagai pembangunan mental yang melingkupi unsur perubahan mental atau karakter bangsa Indonesia harus berjalan seiring, sementara, dalam tatanan dunia baru: membangun sumberdaya manusia yang memiliki daya saing, memiliki kecerdasan, memiliki etos kerja tinggi, berintegritas tinggi dan gotong royong sebagai semangat pluralisme untuk membangun bangsa --- serta berjiwa patriot atau *character and nation building* atau biasa disebut revolusi mental, sedang ideologi: Semangat kebhinekaan sebagai upaya mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita, dan Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Namun yang terjadi sebaliknya, program-program Nawacita bertolak belakang dengan konsepsi dasar Trisakti, lebih tepatnya sebagai "Paradoks Ideologi".

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:**
 AFK, Organski, "Tahap-Tahap Perkembangan Politik", Akademia Pressindo, 1985.
 Dodd, C.H, *Pembangunan Politik*, terjemahan Ratnawati, Jakarta, PT. Bina Akasara Jakarta 1986.
 Gaffar, Afan, *Beberapa aspek pembangunan politik "sebuah bunga rampai"*, Jakarta: Rajawali, 1983.
 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2003.
 Pontoh, Coen husain, *Membedah Tantangan Jokowi-JK*, Banten: Indoprogress, 2014.
 Swasono, Sri Edi, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, Jakarta: Kantor Menko Ekuin, 1997.
 Sasongko, HD. Haryo, *Bung Karno, Nasionalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Grafiksi, 2005.
 Soepriyanto, *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*, Jakarta : Inside Press, 2008
 Sambodo, Dwi Rio, *Catatan dari Kebon Sirih*, Jakarta: Perhimpunan Rumah Indonesia, 2014.
 Sudarsono, Yuwono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, Sebuah Bunga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
 Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani, *Historisitas dan Spiritualitas Pancasila " Refleksi peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila,"* cet Jakarta: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR RI, 2012.
 Williams, Simon, *The Role of the National Interest in the National Security Debate*. United Kingdom: Royal College of Defence Studies, 2012.
- Karya Ilmiah:**
 Rozeta E. Shembilku, *The 'National Interest' Tradition And The Foreign Policy Of Albania*, Boston: Fletcher Tufts University, 2004
- Jurnal:**
 Jati, Wasisto Raharjo: *Memahami Globalisasi sebagai Evolusi Kapitalisme dalam Global & Strategis*, Th. 7, No. 2, Yogyakarta: FISIP UGM.
 Jati, Wasisto Raharjo: *Trisakti, Globalisasi, & Pembangunan Karakter Bangsa*, 2014.
 Sri Edi Swasono, *Artikel: Majalah PP\Th 2002\ Edisi 28, Satu Abad Bung Hatta: Kedaulatan Rakyat Dasar Martabat Bangsa*, 2002
 Kompas, *Ideologi Jadi Penggerak*, Kompas Edisi 8 Agustus 2015.
 Pranoto, M. Arief: *Geo Politik Ilmunya Ketahanan Nasional dalam The Global Review, The Jurnal of International Studies*, Edisi IV, November 2014.

Paparan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
M. Khanif Dhakiri, PADA RAPAT
KERJA NASIONAL (RAKERNAS)
Aliansi Masyarakat Sipil untuk
Indonesia Hebat (Almisbat) dengan tema
"Membangun Sistem Industri yang
Berkeadilan Bagi Semua Pemangku
Kepentingan" Jakarta, 10 November 2015.

<http://news.okezone.com/read/2015/10/30/338/1240999/pp-pengupahan-bencana-besar-bagi-buruh-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.32 WIB.

<http://www.kemempora.go.id/pdf/Pencapaian-1-Tahun-Jokowi-JK.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 09.32 WIB.

Dokumen:

Dokumen Jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian "Visi Misi dan Program Aksi Jokowi – JK", [www. KPU. go. id](http://www.KPU.go.id), diakses pada tanggal 25 Oktober 2014, pukul 12.00. wib.

<http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/03/23/jembatan-tayan-di-kabupaten-sanggau-kalbar-diberi-nama-jembatan-pak-kasih>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 09.37 WIB.

Wawancara:

Sidarto Danusubroto,
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
tanggal tahun 2015

<http://nasional.sindonews.com/read/1046773/18/membangun-perbatasan-negara-kita-1442815710>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015, pukul 14.00. wib.

Wandi Tuturong,
Anggota Deputi IV Kantor Staf Presiden,
tanggal tahun 2015

http://print.kompas.com/baca/2015/09/05/Apa-Kabar-Revolusi-Mental?utm_source=bacajuga, diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.00 WIB.

Wasisto Raharjo Jati, Peneliti Muda Lipi,
tanggal tahun 2015

<http://news.detik.com/berita/2991893/ini-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi-selengkapnya>, diakses pada tanggal 25 September 2015, pukul 12.05. wib.

Arif Budimanta, Direktur Megawati Institut/
Staf Khusus Komunikasi Politik
Kementerian Keuangan, tanggal tahun 2015

<http://print.kompas.com/baca/2015/05/28/Mental-Pancasila>, diakses pada tanggal 25 September 2015, pukul 11.33. wib

Internet:

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1715207/Jokowi.Bicara.Trisakti>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 10.30 WIB.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-selalu-teringat-trisakti-bung-karno.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015, pukul 15.12 WIB

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300054/8203-buruh-akan-awasi-kepemimpinan-jokowi-jk>, diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 09.32 WIB